

---

## KAPABILITAS *DYNAMIC GOVERNANCE* PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMBERLAKUAN *NEW NORMAL* DI MASA PANDEMI *COVID19*

Resa Vio Vani<sup>1)</sup>, Mayarni<sup>2)</sup> \*

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

\* Korespondensi Penulis. E-mail: [mayarni@lecturer.unri.ac.id](mailto:mayarni@lecturer.unri.ac.id)

### Abstrak

Kapabilitas *Dynamic Governance* dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengantisipasi *Covid19* di masa *new normal* melalui kebijakan, pemahaman pencapaian tujuan secara menyeluruh oleh berbagai pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kapabilitas *Dynamic Governance* serta faktor penghambat Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Memberlakukan *New Normal* di masa pandemic *covid19*. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretif* untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Peneliti sendiri sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian ini adalah Konsep kapabilitas dinamis menjadi aspek yang paling esensial dalam upaya pemerintah Kota Pekanbaru untuk meraih keunggulan kompetitif yang mampu mengantisipasi *pandemic Covid19* dan memanfaatkan peluang guna mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan, sehingga dapat menghasilkan dan mengimplementasikan kebijakan adaptif (*adaptive policy*) yang digunakan untuk pengembangan *dynamic capabilities* yang mencakup kemampuan *thinking ahead, thinking again* serta *thinking across* terutama dalam proses pemberlakuan *new normal* di masa pandemic *Covid19*.

**Kata Kunci:** *Dynamic Governance Capabilites, New Normal, Corona virus Disease19*

### **THE DYNAMIC GOVERNANCE CAPABILITIES OF PEKANBARU CITY GOVERNMENT IN IMPLEMENTING THE NEW NORMAL DURING THE COVID19 PANDEMIC**

#### Abstract

*The dynamic governance capabilities government of Pekanbaru City in anticipating Covid19 in the new normal through policies, understanding overall achievement of goals by various parties. The aim of the study is to know how the Dynamic Governance Capability and inhibiting factors government of Pekanbaru City in Implementing New Normal life in Covid19 pandemic. In this study, we used qualitative research methods based on postpositivism or interpretive philosophy. This philosophy uses to explain the conditions with natural objects.*

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

*The key instrument is the researcher self. The results of this study shown that the concept of dynamic capabilities is one of the most essential aspect in efforts the government of Pekanbaru City to gain a competitive advantage so it can anticipate the Covid19 pandemic and take advantage of opportunities to support the achievement of the expected goals, so as to produce and implement adaptive policies that are used to Development of dynamic capabilities that include thinking ahead, thinking again and thinking across, especially on process implementing new normal life during the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** *Dynamic Governance Capabilites, New Normal, Corona virus Disease19*

## PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru berhadapan dengan berbagai macam permasalahan yang bersifat multi-dimensional, dimana pemerintahan dengan birokrasi yang adil dituntut untuk mampu melakukan perubahan dari pola pelayanan yang bersifat birokratis elitis menjadi birokrasi yang bersifat populis. Birokrasi pemerintah bersama dengan sector swasta sebagai pengelola sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan harus mampu memberikan kontribusinya yang optimal. Penerapan *dynamic governance* pada pemerintah daerah memerlukan adanya keterlibatan dari lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang. Disini, pemerintah sendiri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan sebuah kebijakan karena harus ada keterkaitan dengan berbagai pihak.

Pemerintah daerah agar mampu memiliki kapabilitas *dynamic governance* harus memiliki setidaknya dua pilar utama. Pilar tersebut yaitu sumber daya manusia yang mampu untuk berproses yang gesit serta responsive. Penyelenggaraan dari system pemerintahan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal tersebut biasanya memiliki ketidakpastian masa depan serta berbagai praktek yang dilakukan oleh Negara lain.

Kapabilitas *Dynamic Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekanbaru bertujuan untuk mengungkapkan adanya berbagai antisipasi oleh Pemerintah daerah terhadap perkembangan Covid19 di masa new normal melalui berbagai kebijakan serta pemahaman dari berbagai pihak dalam pencapaian tujuan yang harus dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh stakeholders.

Awal kemunculan *Covid19* (*Coronavirus disease 2019*) di Wuhan China yang secara lokal terjadi di wilayahnya lalu menyebar ke berbagai belahan dunia. Covid-19 sendiri awal mula muncul pada akhir periode 2019 dan mulai mewabah di Wuhan China pada akhir Januari 2020. Covid-19 mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia mulai bulan Februari hingga Mei termasuk di Indonesia. Pemerintah Pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada tanggal 28 Mei 2020 dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* menyampaikan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman *Covid-19* menuju Normal Baru (*new normal*), hidup berdampingan dengan *Covid-19*.

Kota Pekanbaru menerapkan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 15 April 2020 berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang pedoman

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

pelaksanaan Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid19)* di Kota Pekanbaru. Namun berdasarkan kesulitan yang hadir baik dari sisi pemerintah maupun sektor swasta dan masyarakat dalam aspek perekonomian yang semakin memburuk akibat terdampak pandemic *covid19* yang mengharuskan untuk berdiam diri dirumah sangat mengganggu aktivitas keseharian dan mata pencarian, sementara perekonomian di masyarakat tidak dapat berhenti total.

Situasi karantina di Kota Pekanbaru yang diakibatkan mewabahnya *Covid-19* berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Hal-hal tersebut diantaranya adalah terjadinya kerenggangan sosial di masyarakat. Kebijakan karantina besar-besaran yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang menggunakan prinsip *distancing* membuat masyarakat harus hidup berjauhan baik secara fisik maupun sosial. Pembatasan sosial berdampak pada perilaku masyarakat yang sangat signifikan.

Perilaku Hidup Baru (PHB) atau dikenal dengan *New normal* resmi di berlakukan oleh Wali Kota Pekanbaru pada 9 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan (SK) No: 399 tahun 2020. Serta menetapkan pemberlakuan pelaksanaan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru nomor 104 tahun

2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *covid-19* di Kota Pekanbaru. Dan Kota Pekanbaru menjadi kota dari enam kabupaten/kota percontohan yang menerapkan *new normal* atau perilaku hidup baru.

Permasalahan yang terjadi pada masa *new normal* di masyarakat semakin kompleks. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa aspek dalam penyelenggaraannya masih sangat dinamis dan belum dapat diprediksi kedepannya akan seperti apa. Berbagai data yang tersedia baik itu oleh pemerintah pusat maupun daerah masih sangat terbatas dan terus mengalami perubahan. Pembahasan mengenai pelaksanaan *new normal* termasuk di Kota Pekanbaru penting untuk dilaksanakan secara spesifik berdasarkan bidang - bidang tertentu. Pemerintah lebih memprioritaskan pada bidang yang paling terdampak akibat pandemic atau bidang-bidang yang dapat berpotensi memunculkan masalah-masalah lanjutan yang jauh lebih besar. Kota Pekanbaru sudah berupaya mengendalikannya di masyarakat sebelum penerapan *new normal*. Pengendalian dilakukan terutama di wilayah yang padat penduduknya harus mendapat penanganan yang optimal dalam pengendalian penularan *Covid-19*. Penerapan gaya hidup baru dalam upaya

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

pengendalian *Covid-19* melalui harus diterapkan pula di tempat kerja.

Peningkatan kasus yang terjadi sesaat setelah penerapan *new normal* disebabkan karena sebelum itu pelaksanaan *new normal* pada tanggal 1 Juni 2020 selama 10 hari pertama hingga 10 Juni 2020 berjalan tanpa petunjuk teknis dan pemerintah Kota Pekanbaru menyerahkan pelaksanaan kebijakan secara mandiri kepada masyarakat, sehingga banyak ditemukan tempat umum yang ramai oleh sekumpulan masyarakat. Seperti pusat perbelanjaan, bundaran tugu keris yang menjadi pusat perkumpulan muda – mudi, serta tempat rekreasi atau hiburan juga ramai dikunjungi masa.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah melaksanakan rapid test masal di beberapa titik salah satunya di Kecamatan Marpoyan Dami, Kelurahan Tangkerang Tengah. Namun dengan minimnya sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat sekitar, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengikuti serta mengurungkan niat karena khawatir apabila hasil dari *rapid test* tersebut akan mempengaruhi kehidupan sosial dan kondisi perekonomiannya. Dan menimbang minimnya tingkat akurasi rapid test tersebut, pemerintah masih belum memberikan solusi alternative seperti SWAB masal yang dinilai lebih akurat dalam pendeteksi *Covid19* sebagai

upaya lanjutan penanggulangan krisis pandemi *covid19* ini.

Permasalahan lainnya muncul ketika wali Kota Pekanbaru mengizinkan Kepala Dinas Kesehatan M.Noer yang baru dilantik pada 26 Juni 2020 untuk cuti selama tiga bulan mulai tanggal 1 Juli 2020 di masa krisis pandemi *covid19*. Hal ini memungkinkan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini, mengingat bahwa peningkatan jumlah pasien positif *Covid19* tersebut membutuhkan kolaborasi yang maksimal dari seluruh *stakeholders*.

Pemerintah Kota Pekanbaru harus berkaca pada konsep *Dynamic Governance* untuk merealisasikan rencana *new normal*. *Dynamic Governance* dilaksanakan pada organisasi pengelolaan yang didasarkan pada kewenangan tertinggi yang dimilikinya termasuk dalam hal ini negara dan atau pemerintah. Keberhasilan penerapan *new normal* dan pengendalian penyebaran *Covid-19* harus melibatkan berbagai pihak yang sangat luas.

Maka dari itu berangkat dari situasi dan kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui proses dan upaya Kota Pekanbaru dalam mewujudkan kapabilitas dinamis saat menghadapi pandemi *Covid19* di masa pemberlakuan *New Normal*.

Berlandaskan pada tiga indikator kapabilitas *dynamic governance*, yakni *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. Ketiga indikator tersebut memfasilitasi berbagai kebijakan yang adaptif. Penerapan sebuah kebijakan harus menanamkan kapabilitas tersebut. Melalui kapabilitas tersebut terdapat strategi yang akan digunakan dalam proses kebijakan baik itu pada tahap pembuatan, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan. Pemerintah dapat melakukan berbagai inovasi terutama dalam penanganan penyebaran *Covid-19* ini.

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk melihat Kapabilitas dan faktor penghambat dalam melaksanakan *Dynamic Governance* Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Memberlakukan *New Normal* di masa pandemic *covid19*. Dengan menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretif*. Filsafat tersebut digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sendiri sebagai instrumen kuncinya.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep *Dynamic Governance Capabilites***

Zollo dan Winter dalam (Darusman, 2020) menyatakan bahwa kapabilitas dinamis merupakan sebuah pembelajaran dan pola yang stabil atas kumpulan aktivitas yang dilakukan secara sistematis oleh organisasi untuk menghasilkan dan mengubah kegiatan operasional rutusnya dalam rangka mencapai hasil yang lebih baik. Pablo et al dalam Darusman (2020) berpandangan bahwa sektor publik menghadapi perubahan lingkungan yang lebih banyak daripada sektor bisnis, misalnya adanya perubahan kebijakan tertentu yang membuat proses bisnis organisasi harus segera beradaptasi. Dengan begitu, upaya membangun kapabilitas dinamis dilihat sebagai faktor sukses yang utama bagi organisasi sektor publik.

Kapabilitas dinamis menurut Aminullah (2015) tidak terjadi secara tiba-tiba atau spontan. Hal tersebut merupakan hasil dari ambisi seorang pimpinan dalam upaya menjamin kesejahteraan masyarakat. Seorang pemimpin yang dinamis memiliki pemikiran visioner ke depan yang lebih baik dari yang lainnya sehingga dapat dihargai oleh semua pihak terutama bawahannya. Seorang pemimpin juga harus mampu mengkonversi alokasi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga mampu mengembangkan kebutuhan organisasi kedepannya. Pencapaian hasil yang diinginkan terutama semua bermula

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

dari adanya kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin mampu untuk bersikap dengan baik dan keterampilan yang lebih dari yang lain yang mampu berkoordinasi dengan semua pihak.

Piening (2013) beranggapan bahwa tanpa memperbaharui kapabilitas dinamis secara berkelanjutan, organisasi sektor publik akan kesulitan untuk merespon secara efektif terhadap perubahan di lingkungan mereka. Dengan begitu, menarik untuk dikaji secara mendalam bagaimana membangun kapabilitas dinamis pada organisasi sektor publik yang dilihat dari berbagai sudut pandang peneliti.

Menurut Kazim dalam Tahir (2017) komponen Kapabilitas menggambarkan bagaimana negara Singapura memiliki pola pikir yang didasarkan atas tiga hal yang terdiri dari pola *thinking ahead*, *thinking again* serta *thinking across*. Disini, *Thinking ahead* menunjukkan bahwa negara Singapura memiliki kapasitas berpikir dimana melakukan setiap perumusan kebijakan dengan melihat kondisi dimasa mendatang yang kemungkinan memberikan dampak terhadap kondisi dalam negerinya. Sebaliknya, pola pikir *thinking again* lebih merefleksikan pada kemampuan dari negara tersebut untuk melihat pada kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, dilakukan evaluasi serta penyempurnaan untuk memperoleh

capaian dari tujuan yang maksimal. Sementara itu, *thinking across* menjadi suatu kemampuan dari negara Singapura dalam berbagai keterbukaan wawasan untuk dapat mempelajari pengalaman maupun ide dari actor-aktor yang lain termasuk konsep yang mereka buat.

Kapabilitas *Dynamic Governance* dari Neo, Boon and Chen (2007) terdiri dari tiga indikator utama yaitu, *Think Ahead*, *Think Again*, dan *Think Across* yaitu:

#### 1. *Think Ahead* (Berpikir ke depan)

Sebagaimana disampaikan oleh Kazim dalam Tahir (2017) *thinking ahead* merujuk pada kapasitas berfikir dari seorang pemimpin dalam merumuskan suatu keadaan pada depan dan dapat memiliki dampak pada keberlangsungan suatu lembaga. Syafri (2012) menjelaskan bahwa kemampuan berpikir ke depan dapat mengidentifikasi faktor lingkungan yang mungkin akan terjadi pada masa depan dengan kebijakan adaptif yang mampu meningkatkan keberlangsungan hidup masyarakat dengan memanfaatkan berbagai kesempatan sehingga mampu menghindari berbagai ancaman yang mungkin saja dapat mengganggu.

#### 2. *Think Again* (Berpikir kembali)

Menurut Syafri (2012) *Think Again* berarti berfikir kembali. Disini pemerintah harus memiliki kemampuan untuk meninjau kembali segala

kebijakan dan program yang telah dibuat dan dilaksanakan. Sedangkan menurut Aminullah (2015) bahwa Thinking again berhubungan pada peninjauan ataupun analisis ulang terhadap setiap data dari kerja pemerintah yang lebih actual dan adanya umpan balik dari setiap stakeholders yang ikut terlibat.

### 3. *Think Across* (Berpikir lintas batas)

Kazim dalam penelitian relevan yang dilakukan Tahir (2017) bahwa *thinking Across* menjelaskan bahwa kemampuan dan juga keterbukaan dalam berwawasan untuk ikut mempelajari pengalaman ide dan konsep dari aktor-aktor lain. Proses dari berfikir lintas batas adalah mampu untuk menciptakan sebuah ide yang baru yang diperoleh dari berbagai kumpulan ide-ide yang inovatif terhadap berbagai isu yang ada menurut Syafri (2012).

Kesimpulannya bahwa kapabilitas dinamis juga dikembangkan dalam organisasi sektor public. Konsep kapabilitas dinamis menjadi aspek yang paling esensial dalam upaya organisasi sektor publik untuk meraih keunggulan kompetitif yang mampu mengantisipasi ancaman dan memanfaatkan peluang guna mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan.

Kapabilitas dinamis ini harus dibangun dari internal organisasi melalui akumulasi pengalaman dan tidak dapat dibeli atau diperoleh dari

luar organisasi. Dengan membangun dan mengaplikasikan konsep kapabilitas dinamis tersebut, organisasi sektor publik pada akhirnya dapat menciptakan kemampuan yang dapat melahirkan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan yang begitu cepat.

### ***Dynamic Governance***

Pemerintah dituntut untuk terus mampu menyesuaikan setiap kebijakan dan program pemerintah demi keberlangsungan masyarakat yang dikenal dengan *dynamic governance*. Pemerintah dituntut pula untuk dapat mengubah pola dalam membuat kebijakan publik sehingga dapat dirumuskan dan dilaksanakan oleh semua pihak. Kondisi tersebut dapat memberikan dampak yang positif dan berjangka panjang dapat tercapai pula.

Kondisi pemerintah yang dinamis sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan pada sector lingkungan perlu untuk diperhatikan karena sering mengalami ketidakpastian serta dalam perubahannya terjadi begitu cepat. Hal tersebut menuntut untuk selalu adanya kecanggihan dalam berbagai hal.

*Dynamic governance* sendiri merupakan bentuk lain dari pemahaman serta pengembangan dari ilmu pemerintahan. Selain itu, merupakan bagian dari pendekatan

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

administrasi publik yang modern sesuai dengan pembangunan *dynamic governance* yang dilaksanakan di Singapura oleh Neo dan Chen.

Sebagaimana disampaikan oleh Anwar dalam Tahir (2017) bahwa konsep dari teori *Dynamic Governance* lebih pada mencerminkan salam upaya yang dilakukan oleh seorang pimpinan yang sengaja dilakukan sebagai upaya membentuk masa yang akan datang dalam suatu pemerintahan. Konsep mendasar dari *Dynamic Governance* itu sendiri merupakan suatu kebijakan yang mampu dikombinasikan dengan budaya yang ada.

Konsep *Dynamic Governance* sebagaimana disampaikan sebelumnya merupakan kombinasi antara kapabilitas yang dimiliki pemerintah dengan budaya. Budaya tersebut lebih cenderung kepada hal yang berupa keyakinan serta nilai yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Hal tersebut merupakan akumulasi dari berbagai pengalaman bersama masyarakat yang didasarkan pada sejarah yang terjadi di masyarakat sehingga menciptakan suatu wujud tatanan nilai kehidupan di masyarakat.

*Dynamic governance* sebagaimana disampaikan oleh Neo, Boon and Chen (2007) menjelaskan, “*dynamic governance is the key to success in a world undergoing accelerating globalization and unrelenting technological advancement*”. Tata kelola

pemerintahan yang dinamis menjadi sebuah kunci sukses sejalan dengan akselerasi terhadap globalisasi dan kemajuan teknologi yang tidak ada hentinya dari waktu ke waktu.

Setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan suatu pilihan yang mencerminkan nilai dan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Hal tersebut tidak lepas sosok pimpinan yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin negara. Kepercayaan (*Trust*) menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah sebagai bentuk harapan dari masyarakat itu sendiri. Setiap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah hendaknya menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan agar tidak merugikan masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan penuh.

Menurut Michels dan Graf dalam Andhika (2017) hal ini terkait pada cara yang dilakukan oleh pemerintah agar tujuan jangka pendek, menengah serta panjang dapat terwujud, maka diperlukan adanya partisipasi dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Setiap partisipasi yang diberikan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kerjasama diperlukan terhadap berbagai sector termasuk pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat madani, dan komunitas masyarakat. Perumusan

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

kebijakan akan berjalan dengan optimal dengan adanya partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan yang diarahkan kepada setiap tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah kebijakan. Setiap partisipasi yang diberikan oleh para pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan swasta sebagai wujud dari negara Indonesia yang berdemokrasi. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mengembalikan kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Pemerintah harus mampu memiliki visi dan misi ke depan dalam rangka mendorong wilayahnya untuk mampu menilai berbagai resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Setiap pimpinan memiliki kemampuan berfikir ke depan sebagai upaya lembaga untuk dapat menimbang berbagai resiko yang mungkin terjadi pada saat kebijakan tersebut disahkan dan dilaksanakan. Kemampuan tersebut perlu untuk melakukan refresh setiap tujuan yang hendak dicapai dan memberikan konsep inisiatif terhadap setiap kebijakan yang baru yang dibuat oleh pemerintah. Kerangka konseptual dari *Dynamic Governance* oleh pemerintah termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru, terdiri atas adanya kemampuan, budaya yang dimiliki serta perubahan yang hendak dicapai. Ketiga hal tersebut dapat optimal apabila pemerintah dapat bekerja dengan sinergis dan interaktif kepada semua *stakeholders* terutama

dalam pembuatan kebijakan sebagai suatu system negara yang dinamis.

Bagi pemerintah, memiliki ketiga kemampuan berfikir dalam pemerintahan yang dinamis tidak hanya menjadi sebuah keterampilan saja dan beroperasi secara independen. Ketiga kemampuan tersebut menjadi satu kesatuan system yang terkait satu sama lain. Sehingga kemampuan yang diberikan dalam tata pemerintahan yang dinamis dapat berjalan dengan optimal karena saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Setiap konsep yang dijalankan oleh pemerintah dalam suatu kebijakan diupayakan untuk mensejahterakan masyarakat. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan jangka panjang negara. Perumusan kebijakan tersebut dengan melibatkan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan) termasuk pemerintah, pihak swasta serta masyarakat. Selain pada saat perumusan kebijakan, pelibatan seluruh stakeholder dilaksanakan pula pada saat penetapan kelembagaan serta pola hubungan antar stakeholders.

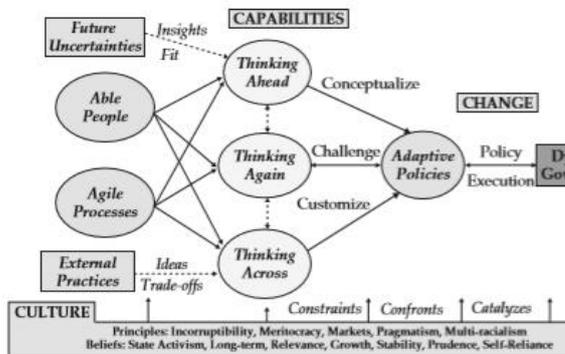
Neo, Boon and Chen (2007) memaparkan *dynamic governance* merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik institusi ataupun lembaga serta struktur pemerintahan yang telah dipilih. Hal tersebut sebagai pendorong bagi

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

pemerintah untuk memudahkan proses interaksi menuju kepada kemajuan ekonomi negara serta kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik.

Konsep Neo dan Chen juga merumuskan *dynamic governance* merupakan proses adaptasi dari bekerjanya suatu kebijakan, institusi, dan struktur dengan berbagai perubahan lingkungan dan ketidakmenentuan kondisi akan tetapi struktur tersebut masih tetap efektif dan relevan untuk mewujudkan tujuan jangka panjang dari program pemerintah dalam untuk mengcover keinginan masyarakat secara umum.



Sumber : Neo, and Chen (2007: 12-46)

Gambar 1 Thinking Framework

Neo, Boon and Chen (2007) dalam tulisannya menjelaskan bahwa landasan dari penerapan *dynamic governance* yaitu budaya kelembagaan. Budaya tersebut ditunjukkan melalui tiga factor dari kemampuan dinamis negara. Factor-faktor tersebut yaitu adanya pemikiran ke depan, pemikiran

kembali serta pemikiran ke arah yang adaptif.

Faktor pendorong yang utama dalam penataan pemerintahan yaitu orang yang mempunyai kemampuan yang cakap. Cakap tersebut diantaranya adalah orang yang gesit, cerdas serta tangkas. Akan tetapi, factor yang cukup berpengaruh adalah kondisi lingkungan sekitar. Faktor lingkungan eksternal (*external environment*) tersebut misalnya masalah kemiskinan, permasalahan keamanan, yang perubahannya tidak mengalami ketidakpastian.

Menurut Gulbrandsen (2014) pemerintahan yang dinamis dapat berjalan dengan optimal apabila kelembagaan yang korup dan nepotisme masih kerap terjadi pada saat pengawasan dilakukan belum cukup demokratis. Kesimpulannya adalah dalam studi mengenai *dynamic governance*, Neo, Boon and Chen (2007) mengartikan kapasitas sebagai ketersediaan dan berfungsinya kemampuan orang (*able people*) dan ketangkasan proses (*agile process*) yang membentuk kapabilitas dinamis sehingga dapat memformulasikan suatu kebijakan adaptif yang mengarah pada kinerja tata kelola organisasi yang lebih baik.

Penelurusan atas beberapa literatur, kapabilitas dinamis ini banyak diterapkan dalam organisasi bisnis sebagai suatu manajemen strategi

---

organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungannya. Namun demikian, kapabilitas dinamis juga dapat diaplikasikan dalam organisasi sektor publik untuk membangun keunggulan kompetitifnya.

### ***Coronavirus Disease 2019 (Covid19)***

*Covid-19* merupakan sejenis penyakit yang menular dimana penyebabnya adalah coronavirus yang baru-baru ini ditemukan di daerah Wuhan Tiongkok. Coronavirus sendiri baru dikenal ketika wabah yang terjadi di Wuhan. Gejala-gejala *COVID-19* yang paling umum dialami oleh orang yang terkena virus yaitu adanya demam, batuk kering serta adanya rasa lelah yang menyerang tubuh. Setiap orang mempunyai rasa yang berbeda-beda. Tidak sedikit pula pasien yang tidak mengalami gejala virus Covid-19. Orang-orang yang tidak mengalami gejala (OTG) yang sangat patut untuk diwaspadai. Berbagai gejala yang dialami oleh pasien awalnya bergejala ringan dan bertahap menjadi berat.

*Covid-19* menyerang system imun manusia. Oleh karena itu hamper sebagian besar orang yang terkena inveksi virus corona dapat sembuh tana harus diberi perawatan yang khusus, bahkan ada yang hanya melakukan isolasi mandiri di rumah. Beberapa orang yang terjangkit virus Covid-19 menderita sakit yang parah dan mengalami sesak nafas. Adapula yang

mengakibatkan kematian. Orang-orang yang mudah untuk terjangkit virus Covid-19 adalah orang-orang yang sudah lanjut usia (lansia), orang dengan kondisi medis ada menyertainya seperti diabetes, gangguan jantung serta tekanan darah tinggi. Orang-orang dengan berpenyakit sebelumnya lebih mudah terkena virus Covid-19 dan menimbulkan penyakit yang lebih parah dan dapat menyebabkan kematian. Orang-orang yang mengalami gejala tersebut sebelumnya tentunya harus segera mencari pertolongan medis.

Rothan & Byraredy (2020) persebaran Covid-19 sangatlah cepat. Setiap orang yang tertular *COVID-19* dapat dengan cepat menularkan ke orang lain. dari orang lain yang terjangkit virus ini. *COVID-19* dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit *COVID-19* batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung atau mulutnya, dapat terjangkit *COVID-19*.

*United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2020) dalam Muhyiddin (2020) menyebutkan bahwa *Covid-19* memukul negara-negara berkembang dan ada beberapa hal yang menjadi dampak

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

pada perekonomian setelah mewabahnya pandemic *Covid19* ini. Yakni Krisis utang yang sedang berlangsung tidak terbatas pada negara-negara berkembang yang termiskin saja, tetapi juga berpengaruh pada semua kategori pendapatan.

Hardy et al (2020) mengatakan bahwa upaya yang bisa diterapkan untuk menahan penyebaran virus *Covid-19*, yaitu dengan membatasi kontak orang-ke-orang dan mendesak masyarakat untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain atau yang dikenal dengan istilah *Social Distancing* atau *Physical Distancing*.

#### ***New Normal***

Jarak sosial yang melebar di masyarakat setelah pemberlakuan *social distancing* memunculkan isu tentang munculnya “*new normal*”. Kondisi tersebut dianggap sebagai miniatur pola interaksi masyarakat di masa depan. Kedepannya, jarak sosial dan fisik yang melebar ini dipercaya akan menjadi sesuatu yang normal.

Kondisi manusia ketika wabah *COVID-19* ini selesai akan semakin menegaskan fungsi teknologi dalam menjadi perantara interaksi manusia. Interaksi manusia secara langsung selanjutnya akan digantikan oleh interaksi tidak langsung. Harari (2020) menyatakan bila hal ini berpadu dengan hadirnya tantangan-tantangan

peradaban yang baru, mulai dari ancaman pengawasan pemerintah via teknologi, meningkatnya kontrol pemerintah atas privasi publik, hingga fenomena hilangnya solidaritas global dalam menghadapi ancaman darurat.

*New normal* adalah langkah percepatan penanganan *COVID-19* dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario *new normal* dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi *COVID-19*.

Saat ini sudah ada 4 provinsi serta 25 kabupaten/kota yang tengah bersiap menuju *new normal*. Penerapan *new normal* nantinya bersamaan dengan pendisiplinan protokol kesehatan yang dikawal jajaran Polri dan TNI. Selanjutnya, tatanan normal yang baru akan diperluas jika dinilai efektif.

WHO mendukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mengkaji rencana respons operasional provinsi untuk seluruh 34 provinsi. WHO juga terus mendukung pemerintah dalam analisis data provinsi untuk menilai kriteria epidemiologis guna mengurangi pembatasan sosial skala besar (PSBB).

Menurut WHO, ada tindakan-tindakan yang tidak bisa ditawarkan untuk

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

menentukan new normal, yaitu: isolasi cepat dari semua kasus yang diduga dan dikonfirmasi perawatan klinis yang sesuai untuk mereka yang terkena *Covid-19* pelacakan kontak ekstensif dan karantina semua kontak setidaknya 80 persen kasus baru dilacak dan kontak mereka dikarantina dalam 72 jam setelah konfirmasi setidaknya 80 persen kontak kasus baru dipantau selama 14 hari memastikan bahwa orang sering mencuci tangan; memakai masker di tempat umum dan tempat kerja, serta menjaga jarak fisik minimal 1 meter dari yang lain.

Selain memberikan panduan apa saja yang harus dipenuhi jika Indonesia ingin menerapkan *new normal*, WHO juga memberikan langkah-langkah perlindungan dasar new normal untuk orang. Langkah-langkah tersebut adalah: sering-seringlah membersihkan tangan Anda dengan gosok atau sabun dan air berbasis alkohol hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut pertahankan jarak fisik, setidaknya 1 meter dari orang lain tinggalkan rumah hanya untuk kebutuhan esensial dan bila memungkinkan bekerja dari rumah jika Anda keluar rumah, di tempat umum dan tempat kerja, kenakan masker kain (non-medis) Sementara itu, masker medis harus dipertimbangkan untuk populasi yang rentan, yaitu: Orang lebih dari 60 tahun.

Orang dengan kondisi yang mendasarinya (penyakit

kardiovaskular, diabetes, penyakit paru-paru kronis, penyakit serebrovaskular, kanker, dan immunosupresi). Hidup berdampingan di tengah-tengah virus yang belum ditemukan vaksinnnya memang akan menjadi tatanan baru. Masyarakat harus tetap melawan penyebaran virus itu sambil beraktivitas seperti sediakala. Aktivitas yang dilakukan bukan seperti sebelum adanya pandemi corona ini.

*New normal* dalam Habibi et al. (2020) adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan *Covid-19*. Prinsip *new normal* adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk *Covid-19* ini.

Masyarakat harus terbiasa dengan keadaan, Tim Gugus Tugas telah siap meracik gerakan bertajuk empat sehat lima sempurna. Gerakan ini tidak sama dengan pola konsumsi makanan yang sudah ada sebelumnya. Ini lebih ditujukan pada pencegahan penularan virus corona. Empat sehat yang dimaksud adalah memakai masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan, serta istirahat yang cukup dan tidak panik. Masyarakat, akan menjalani

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

kehidupan secara *new normal* hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus corona. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk Covid-19. Maka dari itu Setiap langkah menuju transisi *'the new normal'* harus dipantau oleh otoritas kesehatan serta seluruh stakeholders terkait, bersama dengan pertimbangan ekonomi dan sosial.

### Satuan Tugas Penanganan Dampak Penularan Covid19 Kota Pekanbaru

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam hal perumusan kebijakan pelaksanaan perubahan perilaku adaptasi kehidupan baru dalam masyarakat produktif dan aman COVID-19 melakukan protocol. Dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal perumusan kebijakan pelaksanaan perubahan perilaku adaptasi kehidupan baru dalam masyarakat produktif dan aman COVID-19 melakukan protocol kesehatan.



Sumber: Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru No 510 Tahun 2020

Gambar 2 Struktur Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta edaran Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk desk perubahan perilaku. Dalam hal perumusan kebijakan pelaksanaan perubahan perilaku adaptasi kehidupan baru dalam masyarakat produktif dan aman Covid-19, Pemerintah Daerah membentuk satgas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru melakukan:

1. Merangkul seluruh komunitas untuk bekerja sama mengkampanyekan Gerakan 4M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga jarak, Menghindari Keramaian) dengan tujuan utama perubahanperilaku;
2. Analisa yang matang, mendalam, dan berdasarkan *evidence-based* untuk memperhitungkan dampak

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

- sosial dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang dengan memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan sebagai garda terdepan serta memberikan layanan bagi masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Menyiapkan dan menyiagakan segala bentuk sumberdaya dan fasilitas kesehatan yang dimiliki, antara lain dengan bekerjasama dengan rumah sakit swasta sebagai rujukan penderita *COVID-19*, menambah ruang isolasi di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan dan pendukung lainnya, serta meningkatkan kapasitas Puskesmas atau layanan kesehatan primer untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan *COVID-19*;
  4. Melakukan *refocussing* kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah *COVID-19* di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  5. Melaksanakan sosialisasi pembatasan sosial (*social distancing*) dan karantina mandiri (*self-quarantine*) serta perubahan perilaku yang melibatkan desk/tim perubahan perilaku ditingkat provinsi Kabupaten Kota yang terdiri dari unsur *PentaHelix*: semua jajaran Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Media dan menjadi bagian dari Satgasetempat;
  6. Dalam hal pembatasan sosial menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah maka daerah dapat memberikan bantuansosial;
  7. Mengadopsi Strategi dasar Satgas Nasional dan melengkapinya dengan kebijakan khusus perubahan perilaku yang spesifik ditingkat KotaPekanbaru;
  8. Konsultasi dan melaporkan

perkembangan pelaksanaan operasi perubahan perilaku serta antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 secara berkala kepada Satgas Penanganan Covid-19.

### **Kapabilitas *Dynamic Governance* Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberlakuan *New Normal* Di Masa Pandemi Covid19**

Kota Pekanbaru harus menerapkan *Dynamic Governance* agar dapat menghasilkan dan mengimplementasikan kebijakan adaptif (*adaptive policy*) melalui pengembangan *dynamic capabilities* (mencakup kemampuan *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*) pada proses pemberlakuan *new normal* di masa pandemic Covid19.

Kota Pekanbaru mendapatkan indeks paling kecil di Provinsi Riau dalam penularan covid19 selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap ketiga pada 29 Mei 2020 yakni dengan rasio penyebaran 0,4 dari indeks Provinsi Riau yakni rasio 0,88. Namun setelah pemberlakuan *New Normal* atau Pola Hidup Baru (PHB) pada 1 Juni 2020, Indeks kasus di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan melalui beberapa *cluster*.

Kapabilitas *dynamic governance* Pemerintah Kota Pekanbaru dalam

pemberlakuan *New Normal* di masa pandemic Covid19 dapat dilihat sebagai berikut. :

#### 1. *Think Ahead* (Berpikir ke depan)

Pemerintah Kota Pekanbaru membuat kebijakan *new normal* merupakan bentuk alternatif sebagai dasar kebijakan nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan distribusi. Selain itu kondisi sosial juga membutuhkan interaksi. Misalnya kegiatan keagamaan yang tidak mungkin dilaksanakan terus – menerus dalam ruang daring (*online*). Hal ini berdampak besar pada masyarakat sebagai sasaran implementasi kebijakan. Implementasi ini diharapkan mampu menunjang segala upaya maupun program yang dilaksanakan oleh Satuan Gugus Tugas Covid19 Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai implementor kebijakan.

Proses berpikir ke depan dalam sebuah kebijakan meliputi:

1. Mengeksplorasi dan mengantisipasi kecenderungan dan perkembangan masa depan yang mungkin memiliki dampak signifikan pada tujuan diberlakukannya *New Normal*.
2. Memahami bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini, dan menguji efektivitas strategi, kebijakan dan program yang ada.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

- 
3. Opsi strategi apa yang dapat digunakan untuk mempersiapkan munculnya kasus baru dan memanfaatkan peluang-peluang baru.
  4. Mempengaruhi pembuat keputusan dan para pemangku kepentingan utama untuk mempertimbangkan munculnya kasus serius dan melibatkan mereka dalam percakapan strategis mengenai kemungkinan tanggapan.
2. *Think Again* (Berpikir kembali)  
Pemerintah Kota Pekanbaru dalam satuan gugus tugas *Covid19* Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan tinjauan terhadap kebijakan new normal atau pola hidup baru dengan melihat dampak dari berbagai aspek yang ada, dan melihat dari sejak kebijakan new normal pertama kali diterapkan.
- Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis system baru untuk mengatasi masalah berlandaskan strategi yang telah dirampung melalui sebuah kebijakan. Selanjutnya dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat dan seperti apa upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam melibatkan masyarakat untuk mempercepat penanggulangan *covid19* dimasa new normal.
- Proses untuk berpikir lagi meliputi:
1. Meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan umpan balik pemahaman publik dalam menanggapi pandemic *Covid19*.
  2. Meneliti penyebab umpan balik atau mengamati fakta, informasi dan perilaku.
  3. Meninjau hal-hal yang dapat dijadikan sebuah strategi serta kebijakan yang akan dibuat dan program apa yang akan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kegiatan yang berdampak pada masyarakat.
  4. Mendesain ulang berbagai kebijakan baik secara keseluruhan atau hanya sebagian saja sehingga dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah serta dapat mencapai tujuan.
  5. Melaksanakan kebijakan dan sistem baru yang lebih relevan untuk masyarakat.
3. *Think Across* (Berpikir lintas batas)  
Menemukan indikator adopsi inovasi implementasi kebijakan *new normal* dari daerah maupun negara lain. Memperkuat upaya penerapan *new normal* melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala. Serta menemukan indikator penyesuaian penerapan kebijakan new normal seperti sosialisasi pada publik dan upaya lainnya agar tercapainya percepatan penanganan *covid19* di Kota Pekanbaru.

Proses berpikir melintasi batas-batas meliputi:

1. Mencari dan mengadopsi praktik menarik yang dilaksanakan oleh daerah lain dalam menanggapi kasus pandemic *Covid19*.
2. Mengamati dan mempertimbangkan inovasi tersebut untuk di terapkan di Kota Pekanbaru.
3. Melakukan evaluasi apa saja yang kemungkinan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah di masa pandemic saat ini dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi, dan kemungkinan dapat diterima oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

### **Faktor Penghambat Kapabilitas Dynamic Governance Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberlakuan New Normal Di Masa Pandemi Covid19**

Faktor penghambat dalam penelitian ini menyebabkan terjadinya kendala pada pemerintah Kota Pekanbaru saat melaksanakan kebijakan *new normal* di masa pandemic *Covid19*. Selaku pembuat sekaligus pelaksana kebijakan, tentunya pemerintah Kota Pekanbaru telah berupaya untuk melakukan yang terbaik, dapat dilihat dari banyaknya inovasi dan program pencegahan

penanggulangan kasus pandemic *Covid19* di berbagai aspek. Seperti aspek pendidikan, kehidupan sosial masyarakat, perekonomian, serta aspek komunikasi dan informasi penyebaran informasi tentang kasus maupun upaya pemerintah pusat untuk memberantas pandemic ini secepat dan setanggap mungkin.

Namun berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa pihak yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Pekanbaru, bahwa faktor penghambat selama pemberlakuan *new normal* ini, yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat di tuntut untuk mematuhi dan menjalankan protocol kesehatan dengan baik dan benar, namun berdasarkan kondisi empiris bahwa masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan masker dan mematuhi Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2020 tersebut sebelumnya.

2. Edukasi

Minimnya edukasi dan sosialisasi yang tepat sasaran berdampak pada ketidakmampuan masyarakat dalam mengolah informasi dan menjauhi hoax yang tersebar di *media social*.

3. Fasilitas Publik

Dengan diberlakukannya *new normal* ini tentunya membuka peluang bagi fasilitas public seperti Mall, Café

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

dan resto, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, taman hiburan, dan tempat dengan konsumsi public yang tinggi lainnya. Tentunya hal ini dapat menimbulkan cluster baru penyebaran wabah, menimbang bahwa rapid test masal yang di lakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya di ikut sertakan oleh masyarakat hal ini disebabkan oleh minimnya edukasi tentang rapid test dan swab test juga bagaimana jaminan kesehatan yang akan diterima bila masyarakat dinyatakan positif. Hal itu menimbulkan kecemasan tersendiri bagi masyarakat yang minim informasi terkait pelaksanaan new normal beserta aturan dan denda pelanggaran yang telah ditetapkan.

## **KESIMPULAN**

Kapabilitas Dynamic Governance yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan pola pikir yang terdiri atas tiga hal yaitu *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*. Pada pola pikir *thinking ahead* menjelaskan bagaimana kapasitas berfikir dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberlakuan gaya hidup baru atau new normal yang dapat berdampak pada masa dengan daerahnya. Pola pikir *thinking again* merefleksikan bagaimana kemampuan serta keterbukaan pemerintah dengan berkaca pada kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Setelah itu

dilakukan evaluasi serta disempurnakan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. *Thinking across* sendiri merupakan pola pikir yang berlandaskan pada keterbukaan wawasan untuk dapat mempelajari berbagai pengalaman ataupun ide dan konsep-konsep yang telah disampaikan oleh aktor lain. Berdasarkan ke tiga poin di atas, pemerintah Kota Pekanbaru terbukti telah melaksanakan tugas dan berupaya semaksimal mungkin dengan memanfaatkan teknologi dan adopsi inovasi pencegahan serta penanggulangan *Covid19* khususnya di masa *New Normal* atau pola hidup baru. Namun hambatan yang muncul menyebabkan kurang optimalnya proses pelaksanaan kebijakan new normal yang di dukung oleh minimnya partisipasi masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dan mematuhi aturan yang terdapat pada Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 130 Tahun 2020 atas perubahan Perwako Nomor 104 Tahun 2020. Kurang efektifnya sosialisasi edukasi pencegahan *covid19* dan pelaksanaan *new normal*, serta fasilitas publik yang kembali beroperasi memicu titik kumpul yang tidak terkendali, sehingga beberapa *cluster* penyebaran *covid19* kembali terjadi di Kota Pekanbaru.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah.2015.Dynamic Governance (Kerangka Konseptual: Melembagakan Budaya, Kapabilitas, dan Perubahan). *Jurnal Kebangsaan*, 9(1), 17–31.
- Andara, R.2019.Dinamis Dalam Kepemimpinan Studi Atas Kepemimpinan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–18.
- Andhika, L. R.2017.Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance , Dynamic Governance , Dan Open Government ( Comparative Concept of Governance : Sound Governance , Dynamic Governance , And Open Government ). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102.  
<https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.867>
- Bungin, Burhan.2008.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Creswell, J. W.2016.Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Darusman, F.2020.Kapabilitas Dinamis Sektor Publik : Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16, 1–12.
- Gulbrandsen, L. H.2014.Dynamic governance interactions: Evolutionary effects of state responses to non-state certification programs. *Regulation and Governance*, 8(1), 74–92.  
<https://doi.org/10.1111/rego.12005>
- Habibi, A., Normal, N., & Baru, N.2020.*Normal Baru Pasca Covid-19*. 4, 197–204.
- Hardy, F. R., Program, S., Masyarakat, K., & Kesehatan, F. I.2020.*Herd Immunity Tantangan New Normal Era Pandemi Covid-19*. 12, 2020.
- Mayarni.2019.Implementation Of Dynamic Governance Concept In Regional Government Of Siak Regency Mayarni. *Iapa Proceedings Conference*, 35–45.
- Moeloeng, L. J.2007.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhyiddin.2020.Covid-19 New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia Covid-19.*New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. IV(2), 240–252.
- Neo, Boon and Chen, G.2007. *DYNAMIC GOVERNANCE DYNAMIC Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. World scientific publishing co. pte. ltd.
- Piening, E. P.2013. Dynamic Capabilities in Public Organizations: A literature review and research agenda. *Public Management Review*, 15(2), 209–245.  
<https://doi.org/10.1080/1471903>

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

- 7.2012.708358  
Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N.2020.The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease ( COVID-19 ) outbreak. *Journal of Autoimmunity, February*, 102433.  
<https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433>
- Silalahi, A.2020.*Perubahan Pola Hidup Pada Situasi Covid-19 Adaptasi Pada Pola Hidup Normal Baru*. May, 12  
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10961.76646>
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali.2015.*Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Syafri, W.2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Erlangga.
- Tahir, M. dan N. Z.2017. Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Optimalisasi Pengelolaan Lahan Terbuka Hijau Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–13.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12404>
- Dokumen:
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI HK.01.07/MENKES/328/2020
- tentang panduan pencegahan dan pengendalian *Covid19* di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *CoronaVirusDisease 2019 (COVID-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/ 250/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
- Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru nomor 104 tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *covid-19* di Kota Pekanbaruungan *Corona Virus Disease 2019 (Covid19)* di Kota Pekanbaru.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3894](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

Peraturan Walikota (Perwako)  
Pekanbaru nomor 130 tahun 2020  
tentang Perubahan Peraturan  
Walikota (Perwako) Pekanbaru  
nomor 104 tahun 2020 tentang  
pedoman perilaku hidup baru

masyarakat produktif dan aman  
dalam pencegahan dan  
pengendalian *covid-19* di Kota  
Pekanbaruganan *Corona Virus*  
*Disease 2019 (Covid19)* di Kota  
Pekanbaru.